Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic

Political Education Revitalization Through The Establishment Of Anti Money Politic Village

Kenlies Era Rosalina Marsudi*¹⁾ & Sunarso²⁾

- 1) Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia.
2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Diterima: 09 Mei 2019; Disetujui 24 Agustus 2019; Dipublikasikan 01 Desember 2019

Abstrak

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menemukan sebuah resolusi dalam mengatasi fenomena maraknya *money politic* yang seringkali muncul menjelang pemilu di Indonesia. Menurunnya *money politic* menjelang pemilihan umum akan mengurangi angka korupsi, kolusi serta nepotisme (KKN) yang masih tinggi serta dapat menjangkit pemimpin-pemimpin dan wakil rakyat yang kompeten dan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan rakyat. Dengan melakukan penelitian secara kualitatif deskriptif, peneliti mengumpulkan data dan menyelami kondisi nyata yang ada pada masyarakat terkait fenomena *money politic* dan berusaha menemukan solusi yang tepat sasaran. Pembentukan kampung anti *money politic* yang ada di beberapa desa di Yogyakarta merupakan sebuah terobosan terbaru sebagai pendidikan politik pada masyarakat desa yang telah terbukti secara riil mampu menurunkan angka *money politic* secara drastis saat menjelang pemilihan umum. Pendidikan politik melalui pembentukan kampung anti *money politic* mampu meningkatkan kesadaran perilaku politik masyarakat meskipun dengan sumber daya masyarakat (SDM) yang masih rendah. Daerah-daerah lain di Indonesia yang rawan akan *money politic* perlu untuk meniru penerapan kampung anti *money politic* ini sebagai sebuah pendidikan politik model terbaru untuk mewujudkan demokrasi yang baik di Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Money Politics, Pemilihan Umum.

Abstract

This paper aims to find a resolution in overcoming the phenomenon of the rise of money politics that occurs before general elections in Indonesia. With the decline of money politics in the run-up to the general election, it will automatically reduce the number of corruption, collusion and nepotism which are still high and can attract competent and trustworthy leaders and representatives in carrying out their duties as servants of the people. By conducting qualitative descriptive research, researchers collect data and explore the real conditions that exist in society regarding the money politics phenomenon and try to find the right solution. The establishment of anti-money politics villages in several villages in Yogyakarta is a recent breakthrough as political education in rural communities which has been shown to be able to reduce the number of money politics drastically in the lead up to general elections. Political education through the establishment of anti-money politics villages can increase the understanding and political awareness of the public even though the community resources are still low. Other regions in Indonesia that are prone to money politics need to emulate the application of anti-money politics village as the latest political education model to realize good democracy in Indonesia.

Keywords: Political Education, Money Politics, Elections.

How to Cite: Marsudi, K.E.R & Sunarso. (2019). Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 7 (2): 111-121.

*Corresponding author:

E-mail: kenliesenka@gmail.com

PENDAHULUAN

Politik uang dalam setiap momen pemilihan umum baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif di Indonesia merupakan suatu fenomena yang nyatanya hingga detik ini masih tumbuh subur meskipun berbagai regulasi dan badan-badan yang berwenang untuk menindak penyimpangan-penyimpangan dalam berpolitik tersebut telah dibentuk dan diperkuat oleh pemerintah. Harus diakui bahwa politik uang atau kerap disebut sebagai *money politic* ini merupakan momok terbesar dalam setiap rekrutmen politik, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini terjadi, oleh karena politik itu sendiri merupakan sebuah arena tawar-menawar. Tawar-menawar dalam politik yang tidak diimbangi kompetensi, akan menjadi sebuah sistem tawar-menawar “dagang biasa” yang salah satu wujudnya adalah politik uang (Johnson, 2001). Apa yang dikenal sebagai politik uang, merupakan perwujudan dari apa yang dalam sosiologi dikenal *venality*. Istilah ini menunjuk pada keadaan dimana uang dipakai untuk membayar sesuatu yang menurut hakikatnya tidak bisa dibeli dengan uang (Kleden, 2004).

Pengalaman selama ini, praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif di berbagai daerah di Indonesia, tidak saja menghilangkan kesempatan munculnya pimpinan yang berkualitas, tetapi juga telah menimbulkan berbagai gejolak yang mengganggu stabilitas nasional, seperti aksi anarki massa atau pun konflik-konflik vertikal dan horizontal yang berkepanjangan. Dengan demikian, dua kerugian nyata sekaligus yang dialami bangsa ini akibat politik uang, yaitu (i) Sulit mendapatkan pimpinan yang berkualitas, (ii) Munculnya anarki dan konflik vertikal serta horizontal. Pada instansi terakhir, baik pada keadaan yang terpisah ataupun secara akumulatif, dua

keadaan itu akan mengganggu stabilitas nasional dalam berbagai lini kehidupan.

Faktanya untuk melihat fenomena politik uang ini kita tidak dapat serta merta menyalahkan kandidat kepala daerah maupun orang-orang yang mendukungnya atau tim suksesnya yang menjadi pelaku utama politik uang. Realitas yang perlu kita cermati yakni pada sudut pandang lain dimana masih lemahnya pemahaman dan kesadaran politik daripada pemegang hak pilih sendiri yakni pada diri masyarakat. Realita yang ada terutama di desa-desa yang masih belum begitu maju di negara berkembang ini nampak begitu banyak masyarakat yang justru akan mencibir seorang kandidat kepala daerah entah itu pada tingkatan provinsi (gubernur), tingkat kabupaten atau kota (bupati atau walikota) dan tingkat desa (kepala desa) yang tidak memberikan uang saat menjelang pemilihan kepala daerah. Sejalan dengan hal tersebut, para pemegang hak pilih juga justru akan mendukung serta mengapresiasi dalam bentuk suara pada pilkada bagi kandidat kepala daerah yang memberikan politik uang terbanyak.

Realitas tersebut nyatanya memang benar terjadi dan telah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat sendiri. Berbagai badan hukum serta berbagai regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut seolah menutup mata dan tidak dapat menjalankan fungsinya, bahkan terkadang oknum-oknum dari badan yang seharusnya memberikan sanksi bagi pelaku *money politic* justru memanfaatkan keadaan seperti ini untuk kepentingan dirinya sendiri dan menggadaikan tugasnya untuk memastikan berjalannya pilkada yang murni dan konsekuen.

Sejatinya pemilihan kepala daerah yang bebas dari politik uang, selain dapat meredam gejolak sosial politik tetapi juga memungkinkan munculnya pimpinan daerah yang berkualitas. Pemimpin yang berkualitas sangat dibutuhkan di era

desentralisasi dewasa ini. Mengisi otonomi secara bermakna dan berdaya guna, membutuhkan kepemimpinan di daerah yang memiliki kompetensi baik di bidang politik, maupun di bidang *leadership*, manajemen, regulasi, perencanaan, dan komunikasi. Dengan kata lain, daerah butuh pimpinan berkualitas yang relatif paripurna, yaitu pimpinan yang memiliki kemauan dan kaya kepedulian, kompeten sekaligus memiliki legitimasi konstituensi, serta punya semangat tinggi disertai kepekaan hati nurani. Amat sering, karena pengaruh politik uang, acapkali kita asal memilih pemimpin, bukan pemimpin sejati. Harus diakui, terlalu banyak orang yang berambisi menjadi pemimpin. Tapi yang sangat langka adalah orang yang pantas jadi pemimpin, yaitu orang yang dapat dihormati sepenuhnya, yang dapat dipercayai setulus hati, dan yang dapat diandalkan sepenuh hati. Singkatnya, hal serius yang harus dicegah adalah munculnya pemimpin tanpa kepemimpinan (*leaders without leadership*) ataupun pemimpin pemecah bukan pimpinan penyantun (*leader who loots, not leads*).

Situasi politik uang ini nyatanya memang telah mengakar rumput bahkan pada tingkat pemilihan kepala daerah desa atau pemilihan kepala desa. Salah satu daerah yang angka politik uangnya cukup tinggi terdapat di kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, hal ini tidak dipungkiri oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ponorogo sendiri sebagai badan yang bertugas menyelenggarakan Pilkada. Penyelenggaraan Pilkada yang saat ini menggunakan sistem pemilihan serentak yang di gadang-gadang sebagai salah satu solusi untuk menekan adanya *money politic* dan perjudian pilkada nyatanya tidak dapat menunjukkan hasil yang manjur. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan Pilkada yang telah berlangsung, misalnya pada Pemilihan Kepala Desa Serentak yang telah dilakukan di Kabupaten Ponorogo pada Selasa 31 Juli

2018 lalu. Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni mengklaim melalui beberapa media bahwa Pilkades yang berlangsung pada akhir Juli 2018 tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Namun kenyataannya hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. *Money politic* menjadi salah satu unsur negatif yang mewarnai berjalannya Pilkades pada akhir Juli 2018 di kabupaten Ponorogo. Berdasarkan penelitian lapangan yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa kandidat kepala desa yang memberikan *money politic* bagi para pemegang hak pilih. Misalnya di Desa Patik Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, uang yang dikeluarkan untuk satu orang pemegang hak pilih kisaran seratus ribu rupiah hingga lima ratus ribuan rupiah, dan untuk satu kartu keluarga atau satu rumah dengan beberapa pemegang hak pilih mendapat *money politic* kisaran antara lima ratus ribu rupiah hingga satu juta rupiah.

Logikanya, dengan mengeluarkan modal yang cukup besar saat kampanye maka saat telah menjabat akan melakukan segala cara untuk mengembalikan modal tersebut, apalagi jika modal yang digunakan merupakan pinjaman dari pihak lain. Biasanya pihak lain yang memberikan bantuan dana saat masa kampanye juga tidak melakukannya secara cuma-cuma, pihak tersebut akan meminta balas budi seperti berupa proyek-proyek pemerintahan.

Praktik politik uang dalam pemilu ini tentu saja telah menciderai nilai-nilai dari demokrasi. Tumbuh suburnya politik uang juga sangat dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat sendiri, banyak masyarakat yang masih menutup mata dan tidak menganggap masalah politik uang ini sebagai suatu penyimpangan, hal ini karena memang kesadaran politik masyarakat masih rendah. Studi yang dilakukan Kana (2001) menemukan sebuah fakta bahwa dalam sisi sosio kultural masyarakat Indonesia justru

menganggap agenda politik uang ini sebagai suatu tali asih yang menandakan kedermawanan seorang calon pemimpin. Sutoro Eko (2004) juga menemukan fakta yang sama dalam penelitiannya, masyarakat justru akan meragukan kemampuan seorang pemimpin apabila tidak sanggup memberikan tali asih dalam bentuk uang maupun barang kepada warga yang terdaftar sebagai pemilih. Terkait politik uang ini merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dijadikan sebagai sebuah kajian fenomena perpolitikan di Indonesia. Dimana terjadi sebuah penyimpangan demokrasi yang sangat fatal karena memiliki banyak sekali dampak negatif dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Tulisan ini bermaksud menyajikan solusi, yakni sebuah revitalisasi melalui bentuk baru pendidikan politik bagi masyarakat yang dapat di adaptasi bagi berbagai daerah di Indonesia yang rentan terhadap adanya *money politic* menjelang Pilkada dengan pembentukan kampung anti politik uang.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dari penelitian ini maka jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti (Kriyantono, 2010) yakni mengenai “revitalisasi pendidikan politik melalui pembentukan kampung anti *money politic*”. Penelitian ini akan lebih menekankan pada kedalaman atau kualitas dari isu yang dibahas melalui observasi lapangan pada desa-desa yang masih terdapat *money politic* saat pemilu dan desa-desa yang telah menerapkan pembentukan kampung anti *money politic*, wawancara yang mendalam terhadap berbagai sumber yang kompeten seperti KPUD, warga masyarakat dan pelaku *money politic*, serta dokumentasi dari berbagai pihak yang berkepentingan

seperti dari KPUD dan Bawaslu untuk melengkapi kedalaman penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Politik dengan Konteks Ke-Indonesiaan

Pendidikan politik merupakan suatu kegiatan atau aktifitas yang memiliki tujuan terbentuknya dan tumbuhnya orientasi-orientasi politik dalam diri individu. Hajer dalam Kartono (1989) memandang pendidikan politik merupakan sebuah usaha berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang bertanggungjawab dalam perpolitikan negara. Sementara itu, politik dipahami sebagai proses penggunaan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki untuk menerapkan peraturan maupun kebijakan-kebijakan terhadap seluruh masyarakat. Pendidikan politik dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman politik yang baik dan sanggup berpartisipasi secara maksimal yang tercermin dalam perilaku politiknya. Sesuai dengan asas-asas demokrasi, rakyat merupakan sebuah unsur yang memiliki kewajiban dalam berpartisipasi dalam bidang politik untuk memperjuangkan tujuan bersama yang telah disepakati pada sebuah negara (Kantaprawira, 2004). Pendidikan politik tidak semata-mata mengagungkan kekuasaan dan tahta, namun harus syarat akan kebaikan, moralitas, etika dan hukum yang berlaku. Pendidikan politik yang diterapkan harus benar-benar membentuk watak warga negara yang sadar akan politik bermoral sesuai dengan dasar hukum dan hukum dasar di Indonesia.

Pendidikan politik seringkali disangkutpautkan kemiripan artinya dengan sosialisasi politik. Alfian (1981) menyatakan jika sosialisasi politik merupakan pendidikan politik dalam arti yang lebih sempit, dimana proses pendidikan politik mengubah proses sosialisasi politik sehingga masyarakat benar-benar mampu memahami nilai-nilai etis dalam perpolitikan dan mampu

mempraktikkannya dalam perilaku politik mereka. Menurut Kartono (1996) pendidikan politik merupakan suatu upaya yang disengaja untuk menanamkan nilai-nilai politik etis dan bermoral kepada warga negara agar mampu menjalankan perannya sebagai warga negara yang aktif dan memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi dan dipenuhi dengan kesadaran dan pemahaman politik yang benar.

Djahiri (1995) berpendapat bahwa dengan diberikannya pendidikan politik, warga negara akan memiliki rasa keterikatan dan rasa cinta yang tinggi terhadap keharmonisan negaranya. Pendidikan politik merupakan investasi dan dasar bagi pelaksanaan demokrasi yang diterapkan dalam suatu negara (Brownhill and Smart, 1989). Dalam definisi tersebut, tampak bahwa yang hendak dikejar dari penyelenggaraan pendidikan politik adalah terwujudnya keadaan masyarakat dan negara yang stabil, tetapi tetap dapat menjadi lahan subur bagi berkembangnya proses-proses demokrasi.

Menurut Almond dalam (Cholisin & Nasiwan, 2012) pendidikan politik memiliki peran sebagai pengaturan dan kekuatan yang akan menjaga kestabilan sistem politik pada sebuah negara. Kemudian menurut Fore dalam (Utsman, 2000) inti dari pendidikan politik yakni mengaitkan aktivitas pendidikan dengan materi kekuasaan dan kenegaraan yang memiliki keseimbangan pada setiap lembaganya dengan menerapkan prinsip demokrasi. Pendidikan politik merupakan sebuah dialog yang terjadi antara pemberi pesan dan penerima pesan mengenai norma-norma dan nilai etis dalam politik yang harus diterapkan demi keberlangsungan negara yang stabil dan ideal baik melalui agen-agen dari pemerintah, sekolah, dan partai politik (Surbakti, 1992).

Manfaat dilakukannya pendidikan politik ialah warga negara mampu

melakukan tugasnya sebagai warga negara yang aktif dan partisipatif sesuai dengan koridor nilai etis berpolitik (Pasaribu, 2017; Zega, et.al, 2018). Melalui pendidikan politik serang warga negara diberikan pengertian bagaimana melakukan literasi politik yang baik, warga negara juga diminta untuk memahami bagaimana struktur kenegaraan beserta berbagai macam lembaga-lembaga negara (Almond & Verba, 1984).

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai konsep pendidikan politik diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa esensi dari pendidikan politik ialah usaha yang dilakukan untuk menciptakan individu sebagai seorang warga negara yang berkepribadian politik etis, agar memiliki kesadaran politik dan mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan politik masyarakat, bangsa, dan negara.

Landasan pokok yang dipakai dalam melaksanakan pendidikan politik ialah Pancasila, UUD 1945 dan Sumpah Pemuda 1928. Pancasila digunakan sebagai landasan pokok dalam pelaksanaan pendidikan politik, dikarenakan Pancasila merupakan falsafah, pandangan hidup, sekaligus dasar negara Indonesia, yang memberikan identitas kepada bangsa Indonesia. Identitas inilah yang sudah seharusnya disalami oleh bangsa Indonesia, utamanya generasi muda agar dapat memahami secara benar karakter dirinya, potensi keunggulan dan kekurangan yang dimiliki, sehingga mampu mengatasi persoalan hidup dan tantangan global. UUD 1945 merupakan landasan konstitusional, digunakan sebagai landasan pendidikan politik dengan harapan agar bangsa Indonesia, khususnya generasi muda dapat memahami hak dan kewajibannya secara baik serta mampu menjadi warga negara yang sadar dan taat hukum. Melalui tangan-tangan generasi muda yang bersih dan jujur, diharapkan dapat dibangun

negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, maju, adil dan makmur. Sumpah Pemuda 1928 menjadi landasan politik, dikarenakan semangat persaudaraan, kekeluargaan, persatuan dan semangat pantang menyerah yang telah dibangun oleh para pemuda 1928 dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia bahwa dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan akan dapat diwujudkan Indonesia yang jaya gilang-gemilang pada milenium ketiga.

Selain Pancasila, UUD 1945, dan Sumpah Pemuda 1928, terdapat dua pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus menjadi landasan dalam pelaksanaan pendidikan politik, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. NKRI merupakan harga mati bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, dikarenakan bentuk kenegaraan inilah yang terbukti mampu mempersatukan bangsa Indonesia di saat menghadapi krisis persatuan dan kesatuan. Demikian pula, Bhinneka Tunggal Ika merupakan prinsip dan asas berbangsa dan bernegara Indonesia yang tidak bisa diabaikan, dikarenakan dalam realitasnya Indonesia memiliki kemajemukan sosial budaya serta kemajemukan vertikal juga horizontal. Kemajemukan ini harus terus dipelihara dan dijadikan sebagai kekayaan sosial budaya Indonesia, sehingga bangsa Indonesia tidak akan kehabisan bahan kreasi dalam mengembangkan modal berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Money Politic di Indonesia

Uang dan politik merupakan pasangan serasi yang sulit untuk dipisahkan. Secara umum uang dalam penjabaran ekonomi menurut Gedhe & Robertson (1963) dimaknai sebagai alat tukar atau alat yang dipergunakan untuk menunjukkan sesuatu yang diterima secara luas sebagai pembayaran atas barang-barang, atau dipergunakan dalam

bermacam-macam perdagangan lain. Selain itu uang juga dipahami sebagai penyimpan nilai atau alat ukur sumber daya kekayaan (Komarudin 1991). Dengan kata lain, uang dapat dimaknai sebagai sumber daya yang melekat pada setiap individu yang memegangnya untuk digunakan dalam berbagai hal dan tujuan yang berhubungan dengan transaksi.

Sedangkan dalam nalar politik makna uang tidak jauh berbeda dengan sudut pandang ekonomi yakni, sebagai sumber daya yang melekat pada setiap individu yang memilikinya dan mampu memberikan manfaat kewenangan serta kekuasaan bagi setiap pemegangnya dengan berbagai cara. Sehingga perbedaannya terletak pada cara penggunaannya saja. Jika dalam sudut pandang ekonomi uang digunakan sebagai alat tukar barang atau jasa, sedangkan dalam sudut pandang politik uang digunakan sebagai alat tukar yang digunakan untuk merebut, mempertahankan, dan menjalankan kekuasaan. Secara lebih spesifik uang dalam pengertian politik menurut Alexander (2003) merupakan instrumen atau alat, yang memiliki arti penting untuk mengetahui bagaimana ia digunakan orang untuk mencoba mendapat pengaruh, atau di ubah menjadi sumberdaya lain, atau dipergunakan secara kolaborasi dengan sumberdaya lain dalam rangka untuk mencapai kekuasaan. Uang merupakan sebuah elemen penjeja (*tracer element*) dalam mempelajari kekuasaan politik karena sifatnya yang umum dan luas (Alexander 2003).

Uang memiliki karakter yang sangat konvertibilitas sehingga sangat mudah untuk dirubah menjadi berbagai macam kekuatan yang lain, salah satunya kekuatan politik. Bagi Nassmacher dalam Abisano (2012) uang merupakan satu faktor kuat yang mampu menyokong kekuatan politik seseorang. Dengan kata lain, setiap individu yang mempunyai uang dengan jumlah yang banyak akan memiliki

pengaruh politik yang kuat untuk menggalang dukungan dalam proses memperoleh kekuasaan. Termasuk dalam proses pemilihan umum yang menjadi arena untuk memperoleh kekuasaan.

Menurut Badoh dan Husodo (2009) paling tidak terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi kampanye dalam pemilu, yakni kandidat calon, program kerja dan isu atau *track record* kandidat, organisasi kampanye sebagai mesin politik dan sumber daya yang dimiliki (uang). Namun demikian, aspek sumber daya dalam hal ini uang menjadi salah satu aspek penentu berjalannya aktivitas politik. Tanpa uang aktivitas politik tidak akan bekerja dengan kata lain uang merupakan modal penggerak berjalannya aktivitas politik.

Meski demikian dalam prakteknya penggunaan uang dalam kampanye sering kali digunakan dalam saluran non-konvensional yang bertentangan dengan aturan hukum, salah satunya kegiatan *money politic* yakni memberikan sejumlah uang kepada pemegang hak pilih ditukar dengan suara yang dimiliki pemilih tersebut pada saat pemilihan umum berlangsung. Pemegang hak pilih yang telah menerima uang dari seorang kandidat harus mencoblos kandidat tersebut saat dilakukan pemilu di TPS. Sehingga dengan ini uang yang pada mulanya memiliki fungsi ekonomi, sebagai alat jual beli dan kekayaan beralih fungsi menjadi sumber daya politik yang digunakan untuk proses transaksi jual-beli suara yang diakumulasikan untuk memperoleh kekuasaan dalam proses pemilu. *Vote buying* atau pembelian suara merupakan salah satu bentuk dari *money politic* yang menggunakan cara pemberian uang kepada pemilih dalam bentuk uang tunai kepada pemilih. Stokes dalam Sumarto (2014) menjelaskan secara sederhana praktek pembelian suara pemilih dengan uang disebut sebagai politik uang. Secara lebih jauh Schaffer dan Schadler (2007: 17) menjelaskan bahwa

praktek jual beli suara seperti halnya jual beli dalam pasar, dimana pemilik suara akan menjualnya kepada penawar tertinggi. Dalam hal ini logika transaksi komersil bekerja dengan prinsip jika pembeli tidak memberikan penawaran tertinggi atau membayar, seorang penjual tidak akan memberikan suaranya kepada pembeli tersebut.

Money politic atau yang dikenal dengan sebutan politik uang, merupakan studi yang menarik untuk dielaborasi lebih jauh keberadaanya dalam setiap agenda pemilu yang melukai nilai demokrasi. Sebagai arena kontestasi untuk memperoleh kekuasaan, pemilu tidak lagi di lihat sebatas persaingan politik melalui gagasan, program dan visi-misi yang ditawarkan oleh para kontestan wakil rakyat. Akan tetapi pemilu dilihat pula sebagai arena persaingan ekonomi antar calon kepala daerah dengan cara mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya untuk dibagi-bagikan dengan berbagai bentuk dan cara, sebagai upaya untuk memobilisasi massa dan menjaring suara pemilih.

Melihat kenyataan masih tumbuh suburnya fenomena *money politic* di Indonesia mulai dari tingkat akar rumput masyarakat hingga elit-elit politik maka perlu segera disikapi dengan revitalisasi pendidikan politik yang nyata. Persoalan ini akan meruntuhkan pilar-pilar konsolidasi demokrasi yang telah berusaha dibangun negara jika tidak segera ditangani karena berimbas pada berbagai persoalan di berbagai lini kehidupan yang lain. *Money politic* menciptakan pemimpin-pemimpin amoral yang hanya haus akan kekuasaan dan kekayaan, menciptakan warga negara yang pasif dan hanya berpikir pragmatis tanpa memikirkan tujuan dan masa depan berkehidupan yang lebih baik. Kelestarian politik uang dalam tiap peristiwa Pilkada, menarik disimak karena ternyata perubahan sistem pemilihan dari "pemilihan tidak langsung" (versi UU No.

22/1999) ke “pemilihan langsung” (versi No. 23/2004) terbukti tidak menyurutkan terjadinya praktik politik uang. Malah dalam sistem pemilihan langsung, sentrum politik uang melebar ke akar rumput (menjangkau seluruh masyarakat).

Beberapa waktu yang lalu, beberapa wilayah di Indonesia salah satunya pada Kabupaten Ponorogo Jawa Timur melaksanakan Pilkades serentak, peneliti telah menemukan berbagai indikasi penggunaan politik uang dalam Pilkades tersebut. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai revitalisasi pendidikan politik dengan pembentukan kampung anti politik uang sebagai terobosan terbaru dalam mengantisipasi adanya *money politic* menjelang pemilu.

Kampung Anti Politik Uang sebagai Solusi Nyata Mencegah *Money Politic*

Kampung Anti Politik Uang merupakan sebuah terobosan terbaru yang didasari pada kesepakatan dan komitmen dari masyarakat sendiri dan juga para kandidat calon kepala daerah. Hal ini dilakukan karena melihat kenyataan yang ada dewasa ini dimana hukum mengenai *money politic* yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nyatanya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Begitupun dengan berbagai badan yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan pemilu seperti Bawaslu nyatanya tidak mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal. *Money politic* marak terjadi namun penegakan hukumnya tidak dilakukan. Hal ini terjadi karena dari masyarakatnya sendiri juga secara langsung menyepakati dan setuju akan adanya *money politic* yang diberikan kandidat calon kepala daerah yang saat itu mencalonkan.

Gagasan dan praktik desa anti politik uang sendiri di Indonesia pertama kali diterapkan di beberapa desa yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya beberapa desa yang di deklarasikan

sebagai desa anti politik uang ini nyatanya menginspirasi banyak daerah lain yang akhirnya mengikuti jejak membentuk desa anti politik uang. Dengan pembentukan desa anti politik uang ini secara nyata telah menghapuskan praktik *money politic* yang selama ini menjadi momok tersendiri dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Desa di Yogyakarta yang pertama kali menerapkan desa anti politik uang adalah desa Desa Murtigading, Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian beberapa desa lain di Yogyakarta juga mengikuti jejak Desa Murtigading ini, misalnya Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman DIY; Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik kabupaten Sleman DIY; Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo DIY. Peresmian desa anti politik uang pada beberapa desa di Yogyakarta tersebut dilakukan oleh Bawaslu Yogyakarta.

Desa anti *money politic* tersebut menjadi percontohan bagi desa-desa yang lain dalam mengatasi problematika politik uang yang saat ini sudah mengakar rumput di masyarakat. Nyatanya dengan di bentuknya desa anti politik uang ini, *money politic* yang biasanya terjadi menjelang Pilkada, Pilkades, Pileg dan bahkan Pilpres menjadi berkurang secara drastis dan bahkan dinyatakan bersih oleh Bawaslu dari *money politic* pada desa anti *money politic* tersebut. Proses pendirian desa anti politik uang ini dibentuk dengan cara diadakan penandatanganan komitmen dan perjanjian seluruh masyarakat desa yang didampingi serta pengarahan dari Bawaslu serta KPUD, kemudian masyarakat harus berjanji dan bersumpah untuk tak menerima uang dari para kandidat calon penguasa. Diluar peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, dengan kesepakatan bersama tanpa menodai Pancasila, UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang telah ada, masyarakat yang hendak mendeklarasikan sebagai kampung anti *money politic*

membuat perjanjian khusus mengenai sanksi dan hukuman bagi warga yang melanggar kesepakatan.

Hal ini menjadi ampuh untuk mengontrol agar masyarakat serta para kandidat calon pejabat publik untuk tidak melakukan transaksi *money politic*. Menurut keterangan masyarakat dan Bawaslu sendiri, *money politic* yang biasa dilakukan menjadi benar-benar berkurang drastis dan di beberapa desa yang menerapkan kamung anti politik uang, *money politic* seolah lenyap benar-benar tidak ditemukan lagi meskipun tingkat pendidikan dari masyarakat beragam dan relatif masih rendah. Dengan sosialisasi yang intens dan pembuatan peraturan khusus membuat masyarakat menyadari akan pentingnya kejujuran akan berpolitik dan bagi masyarakat yang kesadaran politiknya masih kurang, menganggap tidak menerima *money politic* sebagai bentuk untuk menghindari hukuman dari peraturan khusus yang telah dibuat bersama. Meskipun dalam kesadaran politik masih kurang setidaknya dalam prartiknya beberapa orang tersebut telah melakukan hal yang benar dengan tidak menerima *money politic* dalam bentuk apapun.

Pembentukan desa anti politik uang ini merupakan suatu bentuk pendidikan politik baru yang hasilnya cukup baik dalam meningkatkan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam desa-desa yang telah menerapkan politik anti uang, pembelian suara yang sering ditemui pada saat menjelang Pilkada menurun drastis dan bahkan lenyap. Pemimpin-pemimpin jujur dan amanah juga terlahir dari pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung dengan jujur dan amanah pula.

SIMPULAN

Pendidikan politik merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus oleh berbagai pihak baik oleh pemerintah dan juga masyarakat serta

lembaga-lembaga yang lainnya. Indonesia merupakan negara yang telah memutuskan untuk menggunakan asas demokrasi dalam melangsungkan kehidupan kenegaraan, salah satu bentuk perwujudan dari demokrasi itu sendiri ialah dengan dilakukannya pemilihan langsung oleh rakyat untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat, baik pemimpin di tingkat nasional maupun daerah begitu pula dalam pemilihan wakil rakyat baik dalam tingkat nasional atau DPR serta DPD dan pemilihan wakil rakyat tingkat daerah atau DPRD. Pelaksanaan pemilihan langsung yang dilakukan di Indonesia nyatanya masih jauh dari terwujudnya asas demokrasi yang baik, hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus penodaan terhadap demokrasi salah satunya dengan *money politic*. *Money politic* yang awam terjadi ialah suatu bentuk *vote buyer* atau pembelian suara atau hak pilih. Penjualnya adalah masyarakat yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. Sedangkan pembeli suara adalah calon kandidat pejabat negara entah itu pemimpin maupun wakil rakyat

Money politic ini merupakan suatu fenomena yang sudah mengakar rumput, telah menjadi kebiasaan masyarakat mulai dari pemilihan yang tingkatnya nasional bahkan daerah. Salah satu daerah yang masih tinggi angka *money politic*nya ialah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Pada periode pemilihan kepala desa serentak yang telah berlangsung pada Selasa 31 Juli 2018 telah terjadi fenomena pembelian suara atau *money politic* pada semua desa yang melangsungkan pemilihan. Meskipun politik uang ini secara nyata terjadi namun tidak ada tindakan hukum yang mampu menyentuhnya.

Dalam hal ini kita tidak bisa hanya menyalahkan kandidat yang mencalonkan saja, tetapi masyarakat juga turut andil memegang kesalahan yang paling besar. Rendahnya pemahaman politik dan kesadaran politik yang dimiliki masyarakat

Indonesia, terutama pada masyarakat di desa-desa merupakan salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan masih tumbuh suburnya *money politic* hingga saat ini. *Money politic* merupakan pencidera demokrasi, dengan masih maraknya *money politic* merupakan benih terjadinya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang terjadi kemudian hari serta munculnya pemimpin-pemimpin dan wakil rakyat yang tidak amanah dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Untuk itu, sistem pendidikan politik di negara ini perlu diperbaiki, karena pendidikan yang sifatnya teoritis seperti pembelajaran PPKn di sekolah serta sosialisasi yang dilakukan oleh KPU menjelang pemilihan umum saja belum cukup untuk menyadarkan masyarakat terkait bahayanya *money politic*. Namun, angin sejuk alternatif pendidikan politik yang mujarab telah muncul melalui terbentuknya desa-desa anti *money politic* yang telah didirikan di beberapa desa di Yogyakarta. Pembentukan desa anti *money politic* yang diresmikan oleh Bawaslu ini nyatanya mampu mengubah pandangan masyarakat pedesaan yang pada awalnya terbelenggu oleh adanya *money politic* saat menjelang pemilihan umum. Tingkat *money politic* pada desa-desa yang diresmikan sebagai desa anti *money politic* secara drastis menurun dan bahkan di beberapa desa, *money politic* benar-benar lenyap.

Daerah-daerah lain di seluruh wilayah Indonesia yang rawan politik uang seperti di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur perlu meniru penerapan desa anti politik uang yang telah dipraktikkan oleh beberapa desa di Yogyakarta tersebut. Desa anti politik uang telah terbukti meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat meskipun dengan SDM yang masih kurang, dengan meningkatnya pemahaman serta kesadaran politik masyarakat maka dapat dipastikan *money politic* akan berkurang dan pelaksanaan demokrasi yang bersih akan berlangsung,

kemudian terpilihlah pemimpin-pemimpin dan wakil rakyat yang kompeten, amanah dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta menurun pula angka KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) di bumi pertiwi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abisano, F. (2012). *Money in Political Contestation: An Ethnographic Study in Monet Politics Practise in Yogyakarta's Local Election 2011*, Tesis. Yogyakarta: Program Politik, Fakultas Sosial dan Politik UGM.
- Alexander, A. (2003). *Media Economics: Theory and Practice* (Routledge Communication Series). London: Lawrence Erlbaum Associate
- Alfian. (1981). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Alfian. 1981. *Politik, Kebudayaan, dan Manusia Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Almond, G., & Verba, S. (1984). *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Badoh, I. & Husodo, A. (2009). *Memantau Korupsi Pemilu*. Jakarta: ICW & TIFA Foundation.
- Brownhill, R & Smart, P. (1989). *Political Education*. London: Routledge.
- Cholisin & Nasiwan. (2012). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Djahiri. A.K. (1995). *Kapita selekta Politik Kenegaraan*. Bandung: LPPKH.
- Eko, S. (2004). *Pilkada Secara Langsung: Konteks, Proses dan Implikasi, Bahan Diskusi dalam Expert Meeting "Mendorong Partisipasi Publik Dalam Proses Penyempurnaan UU No. 22/1999 di DPR - RI"*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa.
- Gedhe, G.N. & Robertson, S.D. (1963). *Uang/Money*. Jakarta: Bhratara.
- Johnson, P. (2001). *Partai Politik dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. Dalam Panduan Parlemen Indonesia*. Jakarta: API.
- Kana, N., L. (2001). *Strategi Pengelolaan Persaingan Politik Elit Desa di Wilayah Kecamatan Suruh: Kasus Pemilihan Kepala Desa*. Jurnal Renai. 1(2), 5-25.
- Kantaprawira, R. (2004). *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kartono, K. (1989). *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Jakarta: Mandar Maju.
- Kleden, I. (2004). *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*. Magelang: Indonesiatara,
- Komaruddin. (1991). *Uang Di Negara Sedang Berkembang*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kriyantono, R. (2010). *Teknik praktis riset komunikasi: disertai contoh praktis riset*

- media, public relation, advertising, komunikasi organisaso, komunikasi pemasaran. Jakarta: Kencana.
- Pasaribu, P., (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 5 (1): 51-59
- Schaffer, F.C. & Schedler, A. (2007). "What is Vote Buying", in F.C. Schaffer (ed), *Election for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying*, Lynne Rienner Publishers, Boulder, pp
- Sumarto, M. (2014). *Perlindungan Sosial dan Klientelisme: Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilihan Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Utsman, A., M. (2000). *Tarbiyah Siyasiyah: Pendidikan Politik Ikhwanul Muslim: Studi Studi Analisis Evaluatif terhadap Proses Pendidikan Politik Ikhwan: Untuk Para Anggota Khususnya dan Seluruh Masyarakat Mesir Umumnya dari Tahun 1928-1954*. (Terjemahan). Solo: Era Intermedia.
- Zega, M.A. Muda, I. Batubara, B.M. & Suharyanto, A. (2018). Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, *PERSPEKTIF*, 7 (2): 60-65.